

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (18 Oktober 2021). Ekspor Provinsi Jawa Timur September 2021 sebesar USD 1,99 Miliar atau naik 0,17 persen; Impor Provinsi Jawa Timur September 2021 sebesar USD 2,15 Miliar atau turun 8,41 persen; Neraca Perdagangan Jawa Timur selama bulan September 2021 mengalami deficit sebesar USD 160,43 juta.

<https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2021/10/18/262/ekspor-provinsi-jawa-timur-september-2021-sebesar-usd-1-99-miliar-atau-naik-0-17-persen--impor-provinsi-jawa-timur-september-2021-sebesar-usd-2-15-miliar-atau-turun-8-41-persen-neraca-perdagangan-jawa-timur-selama-bulan-september-2021-mengalami-defisit-sebesar-usd-160-43-juta.html>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (24 April 2015). FAQ Terkait Fasilitas KITE. Admin Web Bea dan Cukai. <https://www.beacukai.go.id/arsip/fas/kite.html>

Kementerian Keuangan. (n.d). *Realisasi PEN Sementara*. Diakses tanggal 27 Desember 2021, dari <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/data-realisasi>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER – 04/BC/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 Tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER – 05/BC/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012 Tentang Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri*

Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Khalimi & Iqbal, (2020). *HUKUM PAJAK-Teori dan Praktik*. Aura Publisher.
<http://repo.jayabaya.ac.id/1079/>

Latief, S. *et al.* (2020). Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270-289.
<https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/index/login?source=%2Findex.php%2FCESJ%2Farticle%2Fview%2F581>

Lestari, Anggi Fitriani & Abdillah Junaedi (2021). Implementasi Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Akibat Covid-19 Di PT MI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Politeknik Praktisi Bandung*, Volume 4 Nomor 1 Bulan Mei 2021.
<http://ojs.elearning-pintar.com/index.php/jebasis/article/view/28/25>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Meylaniputri, A. E. (2021). Implementasi PMK Nomor 44/PMK. 03/2020 dan Perubahannya mengenai Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada PT ABC. Doctoral dissertation UNIVERSITAS AIRLANGGA. <https://repository.unair.ac.id/110956/>

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rahmawati, R. D. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Withholding System Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*,
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/999/988#>

Sari, D. (2017). TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPH PASAL 22 IMPOR PADA KANTOR KPP PRATAMA BANGKINANG. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
<http://repository.uin-suska.ac.id/21869/>

Sumarni, Y. (2020). PANDEMI COVID-19: TANTANGAN EKONOMI DAN BISNIS. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Al-Intaj*.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3358/2666>

Suyedi, S. S., & Idrus, Y. (2019). HAMBATAN-HAMBATAN BELAJAR YANG MEMPENGARUHI HASIL BELAJAR MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN MATA KULIAH DASAR DESAIN JURUSAN IKK FPP UNP. *Gorga: Jurnal Seni Rupa*, 8(1), 120-128.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gorga/article/view/12878>